

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdali, Riza Imaduddin, Ronal Rofiandri, Mitah Fadli, 2018, *Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun ke 5, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Jakarta: YAPPIKA.
- Abdali, Riza Imaduddin, Ronal Rofiandri, Mitah Fadli, Kristina Viri, 2018, *Penyusunan Instrumen Alternatif Surat Keterangan Terdaftar*, Jakarta: YAPPIKA.
- Asari, Syukri, Meyrinda Rahmawati Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly, M. Ali Safaat, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Bahar, Saafroedin, 1998, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Bisariyadi, Abdul Gofur, Intan Permata Putri, 2014, *Konstitusionalitas Pembatasan Kebebasan Berserikat: Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kepanitraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Edwards Michael (ED), 2011, *The Oxford Handbook of Civil Society*, United States of America: Oxford University Press.
- Fadjar, Abdul Mukthie, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Citra Media.
- Falaakh, Mohammad Fajrul, 2014, *Konsisten Mengawal Konstitusi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Huda, Ni'matul, 2018, *Kekuatan Eksekutoial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundangundangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan-Jilid 1)*, Yogyakarta: Kanisius.

- Mahfud, Moh, 2010, *KOnstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhtaj, Majda El-, 2012, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Nazir, Moh, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pradjoto, 1983, *Kebebasan Berserikat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Sarja, 2016, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- S, Maria Farida Indrati, 2020, *Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan-Edisi Revisi*; Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemantri, Sri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sumardjono, Maria S.W., 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Widjojo, Muridan S., 1999; AE Priyono, et al. (Ed.), 2003, *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*, Jakarta: DEMOS

Skripsi/Tesis

- Ahmad Fais Akbar, 2019, *Implikasi Puusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 Terhadap Hak Kebebasan Berorganisasi Bagi Petani*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga, Yogyakarta
- M Najib Ibrahim, 2011, *Hak Berserikat: Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
- Muhammad Najid Auffer, 2019, *Perlindungan Hukum Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Bagi Organisasi Kemasyarakatan Pasca Ditetapkannya Undang-*

Undang Nomor 16 Tahun 2017, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Jurnal

- Agus Priono, Widodo. T. Novianto, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik), *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017*
- Beni Kurniawan; “Konstitusionalitas PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi Volume 15, Nomor: 3, September 2018*.
- Bob Sugeng Hadiwinata, “Civil Society: Pembangun Sekaligus Perusak Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 9 Nomor 1 Juli 2005*
- Brian Tanamaha, 2007, “A Concise Guide To The Rule Of Law”, New York: St. John’s University School of Law
- Desip Trinanda; Hak Asasi Manusia dan PERPPU Ormas, *Jurnal Ijtihad, Vol. 36, No. 2 Tahun 2020*.
- Dwi Nur Imsawati dkk, “Kontribusi Kaum Intelektual dalam Pergerakan Indonesia Tahun 1908-1928”, *Jurnal Hystorica, Vol 1 Tahun 2017*.
- Eka N. A. M. Sihombing, “Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16 No. 1, Maret 2016*.
- Enrico Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi, Volume 16, No. 1, Maret 2019*
- Eryanto Nugroho, “Changing Legal Environments For Civil Society Organizations (Bill on Societal Organization and Freedom of Association in Indonesia)”, *The International Journal of Not For Profit Law, Volume 15, Issue 1, 1 Maret 2013*
- HM Thalhah, “Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen”, *Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009*.

- M Agus Mulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019
- Muchamad Ali Safaat et all; Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013; *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.
- Muwaffiq Jufri, “Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan di bidang Administrasi Kependudukan”*Jurnal Rechtsvinding* Volume 9 Nomor 3 Desember 2020.
- Nur Febriyanto, *Perjuangan Politik KH Ahmad Dahlan Dalam Muhammadiyah di Yogyakarta 1912-1923*, FISIP Universitas Negeri Yogyakarta, 2017
- Robert Post, 1990, *Theorie of Constitutional Interpretation, Representation*, Volume 30, Spring 1990, The Regents Of The University of California
- Sidik Kahono, Muhammad Junaedi, A Heru Nuswanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Asas *Contrius Actus* Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”, *Semarang Law Review*, Vol. 1 No. 1, April 2020.
- Sudarsono, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung”, *MIMBAR YUSTITIA* Vol. 1 No.2 Desember 2017.
- Suparman Marzuki, “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 3 Desember 2013
- Syahrul Ibad “Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik”, *HUKMY Jurnal Hukum* Volume 1, Nomor 1, April 2021
- Qomaruddin, “Pembentukan Undang Undang Dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, Nomor. 4, Desember 2009.
- Teguh Prasetyo, “Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi Oktober 2010
- Tri Sulistyowati, “Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review dan Beberapa Permasalahannya”, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 1, September 2006

Victor Imanuel Nalle; “Asas Contrarius Actus pada PERPU Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan HAM”,*Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH) Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.*

Yasmis, Sarikat Islam dalam Pergerakan Nasional Indonesia (1912-1927), *Jurnal Sejarah Lontar Vo. 6 No. 1 Januari-Juni 2009.*

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138

Peraturan Walikota Bogor Nomor 24 Tahun 2016 Seri E Nomor 16 tentang Pedoman Pendaftaran dan Prosedur Pemberian Surat Keterangan Terdaftar bagi Badan/Lembaga Kemasyarakatan yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial di Kota Bogor.

Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 220.05/33/504 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Seni Budaya Tahun 2017.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Bagi Organisasi Kemasyarakatan, Badan dan Lembaga Di Kota Surabaya.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016

Artikel Dari Media dan Siaran Pers

Ary Burger et all, 2001, The Non Provit Sector in The Netherland, Den Hag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Denny S, Lima Puluh Persen Ormas di Kalsel Tidak Terdaftar, <https://mediaindonesia.com/nusantara/27332/50-persen-ormas-di-kalsel-tidak-terdaftar>, diakses tanggal 7 Agustus 2021.

Fathiyah Wardah; DPR Sahkan PERPPU Ormas Menjadi Undang Undang;
<https://bit.ly/31G7idC> , diakses tanggal 7 Agustus 2021.

JM Muslimin MA, analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Ag/2014; Majalah Peradilan Agama, , Edisi 6, Mei 2015.

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat, Penyusunan Kebijakan Lokal Tentang Ormas: Antara Urgensi, Pilihan Solusi dan Potensi Masalah, 24 Juli 2020,
<https://bit.ly/3gpkIs2>, diakses 22 April 2021

Sitti Mawar; Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum.

Moh Mahfud MD, *Jangan Kacaukan Asas Hukum*, Opini Kompas edisi 11 November 2017.

Pan Mohammad Faiz, “Judicial Restraint vs Judicial Activism”, Majalah Konstitusi No. 130, Desember 2017.